

KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA TOMPO BULU, KEC. BALOCCI, KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

INSTITUTIONAL CAPACITY IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN TOMPO BULU VILLAGE, KEC. BALOCCI, DISTRICT. PANGKAJENE AND THE ISLANDS

Sulmiah¹, Nurhidayah², Muhammad Guntur³, Oky Nur Pratiwi Johansyah^{4*}

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
email: sulmiah@unm.ac.id

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
email: nurhidayah@gmail.com

³Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
email: m.guntur@unm.ac.id

⁴Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
email: oky.nur.pratiwi@unm.ac.id

Article History

Submitted: 2 Juni 2024

Review : 7 Agustus 2024

Publish: 25 September 2024

ABSTRAK

Kata Kunci (Keywords): Kapasitas Kelembagaan (*Institutional Capacity*); Pengembangan Desa Wisata (*Tourism Village Development*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan desa wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kapasitas kelembagaan berperan dalam pengembangan desa wisata, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam dimensi kelembagaan yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa mendatang. Selain itu, dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan organisasi terkait dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan potensi desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data interaktif melalui tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan lima dimensi yang diukur sudah cukup baik dalam menunjang pengembangan desa wisata. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara bersama informan mengenai lima dimensi yang diukur untuk mengetahui kapasitas kelembagaan sehingga dapat disimpulkan bahwa, nilai, norma, dan praktik sosial yang baik. Kemudian individu, organisasi, dan

* Oky Nur Pratiwi Johansyah
Email: oky.nur.pratiwi@unm.ac.id

jaringan organisasi yang cukup. Sedangkan tata kelola publik yang masih kurang.

Abstract

This research aims to determine Institutional Capacity in the Development of Tourism Villages in Tompo Bulu Village, Balocci District, Pangkajene and Islands Regency and provide an in-depth understanding of how institutional capacity plays a role in developing tourist villages, as well as identifying strengths and weaknesses in existing institutional dimensions, so that can provide recommendations for future improvements. Apart from that, it can have a positive impact on the development of tourist villages, this research can also be a reference for local governments and related organizations in developing more effective policies and strategies to optimize the potential of tourist villages. This research uses a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique used in this research is interactive data analysis through stages: data condensation, data presentation, and conclusion testing. The results of this research show that institutional capacity in developing tourist villages in Tompo Bulu Village, Balocci District, Pangkajene and Islands Regency based on the five dimensions measured is quite good in supporting the development of tourist villages. This is shown by the results of interviews with informants regarding the five dimensions measured to determine institutional capacity so that it can be concluded that values, norms and social practices are good. Then sufficient individuals, organizations and organizational networks. Meanwhile, public governance is still lacking.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan jutaan kekayaan. Sumber daya alam yang melimpah dengan segala keindahan dan keunikannya mulai dari hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas. Semua ini dimiliki oleh Indonesia dan tersebar diberbagai provinsi yang ada. Salah satu sektor unggulan Negara Indonesia adalah pariwisata. Dengan meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata akan menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur ([Ghani, 2017](#); [Prayudi, 2020](#)).

Keunggulan dan keindahan alam inilah yang membuat pariwisata Indonesia sangat berpotensi dikenal oleh mancanegara. Pariwisata merupakan salah satu jalan penggerak perekonomian pada suatu negara ([Pajriah, 2018](#); [Wibowo et al., 2019](#)). Olehnya itu, pedoman terkait pariwisata resmi diterbitkan pada Undang-undang No. 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata pada pasal 1 menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata sendiri tidak hanya menyajikan keindahan alam namun pariwisata bisa menjadi jembatan agar pelestarian budaya bisa tetap terjaga.

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut

melalui suatu kegiatan yang harus melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, politik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi, dan akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi ([Khairul Amri et al., 2022](#); [Nurjanah, 2018](#)).

Pariwisata merupakan industri yang banyak dikembangkan di negara-negara berkembang, karena dianggap memiliki peran yang besar dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([Ahmad, 2022](#); [Aliansyah & Hermawan, 2021](#); [S. Wibowo et al., 2017](#)). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Sektor pariwisata yang mengalami perkembangan pasti akan berpengaruh pada sektor lainnya. Setiap destinasi wisata pasti berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah serta peran dari masyarakatnya. Hingga pengembangan potensi wisata itu bisa berlangsung dengan baik. Desa wisata memiliki definisi yang sangat beragam. Di antaranya, desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ([Ahmad, 2022](#); [S. Wibowo et al., 2017](#)).

Perkembangan pariwisata di Indonesia beberapa tahun belakangan ini telah masuk ke dalam tatanan baru. Kecenderungan perkembangan pariwisata di Indonesia adalah perkembangan model pariwisata berbasis desa wisata ([Mahadewi & Sudana, 2017](#); [Prafitri & Damayanti, 2016](#); [Susyanti & Latianingsih, 2015](#)). Perkembangan desa wisata tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk komponen Kelembagaan dalam pengelolaannya, sesuai dengan pendapat menurut ([Prafitri & Damayanti, 2016](#)) bahwa dalam konteks pariwisata, kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan menurut [Paskasari \(2020\)](#) merupakan sekumpulan nilai, norma, peraturan dalam suatu kumpulan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata ([Hidayat & Muchtar, 2022](#); [Prafitri & Damayanti, 2016](#); [Suganda, 2018](#)).

Pengembangan desa wisata telah diterapkan sebagai alternatif pembangunan ekonomi lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mencanangkan pengembangan desa wisata yang merujuk pada konsep *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan ([Anggraini, 2019](#); [Santi et al., 2022](#)). Secara definisi, *sustainable tourism* adalah pariwisata yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan ([Rahmat & Apriliani, 2022](#); [Ira & Muhamad, 2020](#)). Baik bagi masyarakat maupun bagi wisatawan. Kemenparekraf memberlakukan pedoman dalam pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yang terdiri dari empat kategori, yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan

ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan.

Pengembangan desa wisata akan berhasil jika semua potensi desa baik sumber daya manusia (SDM) dan potensi wisata yang dimiliki termasuk promosi dan pemasaran produk pariwisata, dapat disinergikan secara maksimal dan harus mendapat dukungan terutama dari pemerintah desa dan masyarakatnya beserta dukungan *stakeholder* yang concern terhadap pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja, transaksi perdagangan produk asli daerah juga akan meningkat yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa tersebut ([Feriani, 2020](#); [Nur & Mariantha, 2018](#); [Pramono et al., 2022](#)).

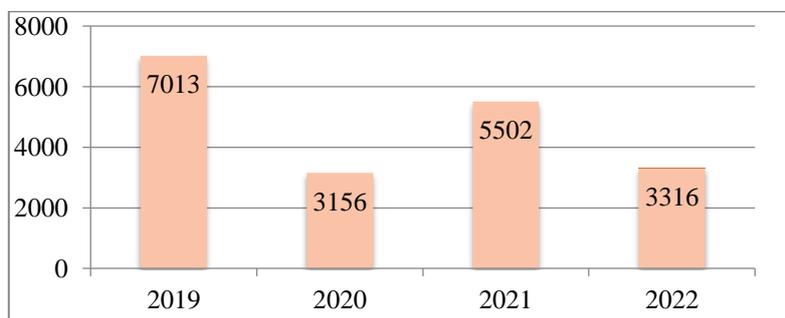
Desa Tompo Bulu menjadi salah satu desa yang melakukan pengembangan pada bidang pariwisata. Desa Tompo Bulu terletak sekitar 60 km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Desa Tompo Bulu memiliki luas 5.752 M², dan dihuni lebih dari 2000 jiwa, dengan kepadatan penduduknya sebesar 32 jiwa/km². Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan suku Bugis Makassar dengan bahasa mentah (Dentong). Wilayah pegunungan yang memiliki potensi wisata yang cukup strategis untuk menarik para wisatawan yang menyukai daerah perbukitan pun lengkap di Desa Tompo Bulu. Desa Tompo Bulu memiliki keindahan alam, keunikan, nilai ilmiah dan sosial budaya yang tinggi. Desa Tompo Bulu termasuk dalam kawasan Geopark Nasional Maros-Pangkep (GNMP). Desa Tompo Bulu memiliki sumber daya manusia yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, pedagang, buruh harian, peternak, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak hanya dari sisi sumber daya manusianya, namun sumber daya alam Desa Tompo Bulu terbilang masih baik. Mulai dari flora hingga fauna, lengkap kita dapatkan disini.

Desa Tompo Bulu telah menyalang kategori desa wisata sejak tahun 2022, mulai dari peringkat 500 besar di tahun 2022 hingga peringkat 75 besar di tahun 2023. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) telah mencatat berbagai keistimewaan yang dimiliki Desa Tompo Bulu. Mulai dari potensi wisata alam, edukasi agrowisata, hingga kearifan lokal. Desa Tompo Bulu berada dalam Gugusan batu karst terbesar kedua setelah Cina. Menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung desa dengan segudang potensi wisata seperti wisata pendakian Bulusaraung yang ikonik yang menjadi 7 *site* wisata adalah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang telah lama dikenal dikalangan pendaki Indonesia bahkan mancanegara dan merupakan bagian dari gunung tertinggi keempat di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada pendakian Batu Putih, Air Terjun Tombolo, Gua Horizontal seperti Marakallang, Passosoang Tunabbaka, Panrandare, Gua Batu Putih dan Gua Vertikal Paenre.

Desa Tompo Bulu memiliki banyak potensi alam yang dapat memikat pandangan wisatawan untuk berkunjung. Potensi yang ada ini tentu memerlukan pengembangan untuk menghantarkan Tompo Bulu mencapai desa wisata yang dikenal diseluruh kalangan bahkan mancanegara. Namun Desa Tompo Bulu saat ini, masih belum diketahui secara luas. Kemampuan promosi yang belum mampu memperkenalkan objek wisata pada sosial media secara luas. Selain itu pengelolaan ide dan inovasi untuk mengembangkan objek wisata masih rendah sehingga objek wisata yang nampak hanya begitu-begitu saja tanpa adanya pengembangan objek wisata. Dari sisi individu atau Sumber Daya Manusia (SDM) juga belum aktif meningkatkan kemampuan pengelolaan untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Keterampilan dan kinerja yang diharapkan tidak terealisasikan dengan baik. Keterampilan berupa kemampuan berbahasa asing juga masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pengunjung yang berasal dari mancanegara. Selanjutnya organisasi yang berperan sebagai wadah yang menampung individu tersebut juga masih lemah dalam pengorganisasian, pengaturan pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Organisasi yang mengelola wisata seperti Pokdarwis dan KPE Dentong mengalami kelemahan internal. Sehingga hal seperti ini juga akan menghambat jaringan organisasi yang lebih luas agar tujuan untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada kurang mendapat perhatian.

Data pengunjung yang mengalami penurunan diperoleh peneliti pada Januari 2023. Hal ini harusnya menjadi perhatian khusus sebagai bahan evaluasi untuk seluruh pihak yang berperan dalam pengembangan wisata. Dapat kita lihat Data Pengunjung Desa Tompo Bulu pada diagram batang berikut.

Tabel 1.1 Data Pengunjung Desa Tompobulu



Sumber: Kelompok Pengelola Ekonomi (KPE) Dentong Desa Tompobulu

KAJIAN LITERATUR

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Prakitri & Damayanti \(2016\)](#) yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pengembangan desa wisata, menjadi referensi karena adanya kesamaan dalam pengembangan desa wisata. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Ketenger Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Desa Wisata Ketenger telah memiliki kapasitas baik kapasitas organisasi maupun kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan secara efektif apabila kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak didukung dengan kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi yang dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan oleh Ari Cahyono sebagai koordinator lapangan dan pemimpin Pokdarwis “Ketenger Adventure” menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Pokdarwis “Ketenger Adventure” kurang baik karena adanya ketergantungan terhadap pemimpin organisasi dan adanya permasalahan pada aspek koordinasi. Pada aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan atraksi wisata serta aspek promosi desa wisata, organisasi pengelola Desa Wisata Ketenger telah menunjukkan kapasitas yang baik ([Prafitri & Damayanti, 2016](#)).

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Iriansyah \(2014\)](#) yang berjudul Kapasitas Kelembagaan dalam Mengembangkan Desa Wisata. Penelitian ini menjadi referensi karena adanya kesamaan yang meneliti tentang kapasitas lembaga dalam proses pengembangan desa wisata. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian, yang mana pada penelitian ini berlokasi pada desa wisata di Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Desa Selojejo dalam mengembangkan desa wisata masih belum berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari aspek strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaan, alokasi sumber daya dan hubungan dengan pihak luar.

Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Paskasari \(2020\)](#) dalam jurnal yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti juga melakukan metode penelitian yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 aspek yang digunakan untuk melihat kapasitas kelembagaan, yakni aspek Manajemen dilihat dari kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jejaring dan hubungan dengan *stakeholder*. Kepemimpinan strategis di pengelola dinilai masih kurang baik, untuk manajemen program dan proses juga masih kurang baik, namun dari segi mengelola jejaring dan hubungan sudah baik. Aspek kedua kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber daya manusia masih kurang baik, dari pengelolaan sumber daya infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan juga kurang baik. Untuk aspek terakhir dilihat dari partisipasi pengurus masih kurang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tompo Bulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkajene dan Kepulauan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sebagai salah satu desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara peneliti dengan informan atau narasumber. Serta, data sekunder (sumber data tertulis), yaitu data yang berupa literatur terkait, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun informan pada penelitian ini bersumber dari orang/masyarakat, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah lembaga desa, seperti pemerintah, dan masyarakat yang ada di wilayah Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri dan alat peneliti yang digunakan oleh peneliti adalah kamera dan pedoman wawancara.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman ([Mikasih et al., 2024](#)) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Aspek individu berupa keterampilan dan kinerja merupakan indikator utama yang diukur untuk menentukan kapasitas kelembagaan sesuai dengan teori yang digunakan. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dapat mengetahui dan mengukur aspek individu ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak MH selaku Ketua Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong saat ditanyai tentang partisipasi anggota kelompok pengelola ekowisata dentong, menyatakan bahwa:

“Sebagai ketua, saya bertanggung jawab secara umum atas kerja-kerja dalam organisasi ini. Saya selalu mengajak, mendorong, dan memerintahkan anggota untuk ikut andil, turut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata di desa kita”. (Wawancara dengan MH, 10 April 2023).

Selanjutnya, partisipasi individu ini membutuhkan keahlian dari individu tersebut. Kemampuan individu mencerminkan kualitas terlaksananya kegiatan dengan baik dan sukses. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak H selaku Anggota Pokdarwis

(Kelompok Sadar Wisata) saat ditanyai tentang kemampuan individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan, menyatakan bahwa:

“Saya lebih banyak bergerak dengan memberdayakan pemuda desa untuk pengembangan wisata dan menyampaikan gagasan - gagasan dalam hal peningkatan kapasitas pengelola serta memberi dorongan untuk pengembangan usaha kreatif pengurus ekowisata dan anggota Pokdarwis. Hal ini sesuai dengan bidang/ divisi saya di organisasi. Kemudian terkait kemampuan berbahasa asing, tidak semua anggota mampu dan tahu tapi kami telah mempersiapkan anggota yang memiliki kemampuan berbahasa Asing dengan fasih” (Wawancara dengan H, 10 April 2023).

Manajemen organisasi merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah organisasi. Cara mengelolah organisasi merupakan penentu dalam baik buruknya organisasi. Pengelolaan organisasi yang baik akan memberikan hasil organisasi yang baik pula. Manajemen organisasi ini merupakan proses pengelolaan, perencanaan, pengelompokan, dan pamantauan dalam sebuah organisasi. Lebih luas, George R. Terry mengkonsep pola POAC yakni aktivitas perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Berangkat dari pendapat ahli tersebut, makna manajemen organisasi sangat luas dan memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak H, selaku anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) saat ditanya terkait, penempatan anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dan disetujui anggota tersebut, anggota yang telah ditempatkan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, sehingga penempatan tersebut menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi kami sebagai sebuah wadah organisasi” (Wawancara dengan H, 10 April 2023).

Jaringan organisasi, merupakan kemampuan untuk berjejaring atau bekerja sama antar organisasi lain terkait. Jaringan organisasi ini memerlukan keterampilan khusus dari organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan dapat diukur dari kemampuan organisasi dalam kapasitas jaringan atau menjalin kerja sama dengan pihak atau organisasi terkait. Kerja sama yang terjalin mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi dalam menjalankan tugas organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Z selaku sekretaris kelompok pengelola ekowisata (KPE Dentong) saat ditanya tentang organisasi lain yang telah menjalin kerja sama dengan organisasi kelompok pengelola ekowisata (KPE Dentong) dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan tahapan dalam menjalin kerja sama, menyatakan bahwa:

”Iya, kami pernah menjalin kerja sama dengan pihak lain. Sudah banyak seperti organisasi pencinta alam jika ada acara aksi bersih di Gunung Bulusaraung. Untuk langkah dalam menjalin kerjasama dengan organisasi lain, biasanya kita posting sosial media KPE Dentong jika terdapat aksi kerja bakti” (Wawancara dengan Z, 10 April 2023).

Tata kelola publik, berupa kerangka peraturan dan pengaturan sektor publik. Sektor publik yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibiayai dengan pajak atau pendapatan Negara yang lain yang diatur melalui hukum ([Bastian, 2019](#); [Haryono, 2013](#)). Pada tata kelola publik ini, berfokus pada fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan pariwisata, kondisi sarana dan prasarana serta teknis penyediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu N selaku sekretaris kelompok sadar wisata (Pokdarwis), menyatakan bahwa:

“Untuk fasilitas sendiri kedepannya masih butuh perbaikan dan peningkatan lagi dek, karena seperti yang sudah saya bilang, Pokdarwis ini sendiri juga masih baru, jadi semua hal di dalamnya juga pasti masih ada kekurangan. Teknis penyediaan sarana dan prasarana pertama dirapatkan dulu secara internal dengan semua anggota apa yang diperlukan, setelah sudah jelas dan disimpulkan yang dibutuhkan baru pengajuan proposal ke pihak - pihak terkait untuk pengadaannya. Untuk sarana dan prasarananya sudah lumayan, tapi juga masih ada perlu perbaikan contohnya seperti toilet umum” (Wawancara dengan N, 10 April 2023).

Aspek selanjutnya adalah aspek nilai, norma, dan praktik sosial. Norma, nilai dan praktik sosial, ini menunjukkan lingkungan budaya, ekonomi, dan sosial yang luas, dimana sektor publik berfungsi. Secara luas, aspek ini berupa lingkungan dan budaya yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Perkembangan teknologi dan pariwisata bisa menjadi faktor yang dapat membuat budaya yang dianut dalam masyarakat luntur. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak H, selaku anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis) saat ditanyai tentang, budaya masyarakat dalam partisipasi kegiatan pariwisata, menyatakan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat Tompo Bulu terlibat aktif berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan. Mengenai budaya tentu harus dipertahankan karena menurut kami disini budaya, adat merupakan bukti sejarah peradaban nenek moyang kami, yang artinya melupakan budaya berarti melupakan nenek moyang. Disisi lain budaya merupakan daya tarik tersendiri dalam hal pariwisata. Langkah dalam melastarikan budaya tentu dengan melakukan pembinaan terhadap pemuda dan anak usia sekolah serta beberapa budaya khas yang memang sudah tertuang dalam peraturan desa dan telah ditetapkan sebagai sebuah budaya khas yang tidak dimiliki desa lain. Seperti menikah wajib di hari jum'at, upacara Adat Mappalili yang mewajibkan sajian Beppa Letto' (kue Letto) dan banyak lagi tradisi lainnya” (Wawancara dengan H, 10 April 2023).

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah lembaga desa di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lembaga atau organisasi desa yang menjadi informan utama adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong (KPE Dentong). Terdapat 5 dimensi yang digunakan sebagai indikator pengukuran pada penelitian ini, yaitu

Individu, Organisasi, Jaringan Organisasi, Tata Kelola Publik, dan Norma, nilai dan praktik sosial. Pada aspek individu yang ingin diukur adalah keterampilan dan kinerja dari Pokdarwis dan KPE Dentong di Desa Tompo Bulu, Selanjutnya pada aspek organisasi yang ingin diukur adalah manajemen organisasi dari Pokdarwis dan KPE Dentong di Desa Tompo Bulu. Selanjutnya pada aspek jaringan organisasi yang ingin diukur adalah kapasitas jaringan dari Pokdarwis dan KPE Dentong di Desa Tompo Bulu. Kemudian pada aspek tata kelola publik yang ingin diukur berupa pengaturan sektor publik di Desa Tombobulu. Sedangkan pada aspek norma, nilai dan praktik sosial yang ingin diukur berupa lingkungan dan budaya di desa Tombobulu.

Aspek individu memainkan peran penting dalam pengembangan wisata di Desa Tompo Bulu. Berikut adalah beberapa aspek individu yang relevan dalam konteks pengembangan desa wisata: Individu yang terlibat dalam pengembangan desa wisata perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan ([Hiryanto et al., 2020](#); [Prafitri & Damayanti, 2016](#)). Mereka harus memahami tentang industri pariwisata, manajemen destinasi, pemasaran, kelestarian lingkungan, kebudayaan lokal, dan sebagainya. Keterampilan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, atau kolaborasi dengan ahli dan profesional terkait. Pada 7 Agustus 2022, organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis kelompok pemuda desa oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama bersama Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka dari Universitas Negeri Makassar ini berlangsung di aula kantor Desa Tompo Bulu selama 2 hari pelatihan.

Pelatihan yang dilakukan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong dalam mengelola desa wisata. Selain itu terdapat pula beberapa bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong seperti pengelolaan website, pengelolaan media sosial, dan pelatihan fotografi untuk menunjang kemampuan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jiwa Kewirausahaan juga menjadi salah satu aspek individu yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Seorang individu yang memiliki semangat kewirausahaan dapat melihat peluang, mengidentifikasi ide-ide inovatif, dan mengambil inisiatif untuk mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman wisata yang unik dan menarik. Jiwa kewirausahaan juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan, mengambil risiko yang terukur, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan desa wisata.

Organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong dalam memanfaatkan peluang berwirausaha ini selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Seperti pada peringatan 17 Agustus di tahun 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memberikan

tanggung jawab kepada Pokdarwis dan KPE Dentong untuk menjadi panitia pelaksana pada kegiatan tersebut. Pokdarwis dan KPE Dentong menyediakan tenant untuk masyarakat yang ingin berjualan di lokasi kegiatan. Hal ini tentunya akan memupuk jiwa dan semangat berwirausaha yang dimiliki oleh anggota organisasi dan masyarakat.

Selain itu, Pokdarwis dan KPE Dentong juga memfasilitasi para wisatawan yang ingin merasakan kuliner khas Tompo Bulu saat berkunjung. Misalkan kuliner so'ri, kalua, tenteng, dan berbagai kuliner lainnya. Biasanya untuk penyediaan makanan tradisional, para anggota Pokdarwis ataupun KPE Dentong memberikan kesempatan kepada ibu rumah tangga yang bersedia menyediakan kuliner tersebut.

Kreativitas dan Inovasi juga menjadi hal yang penting yakni kemampuan individu untuk berpikir kreatif dan inovatif sangat berharga dalam pengembangan desa wisata. Mereka dapat menciptakan konsep baru, merancang program wisata yang menarik, mengembangkan produk atau kerajinan lokal yang unik, dan menyajikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan. Kreativitas juga penting dalam mempromosikan desa wisata dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif.

Selain itu, Pokdarwis dan KPE Dentong selalu bersinergi dalam menciptakan konsep baru dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Destinasi wisata Lembang yang terdapat balon udara merupakan ide kreatif dari organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong untuk memberikan poin lebih terhadap destinasi wisata yang ada. Hal tersebut tentu menjadi hal yang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata dan akan meningkatkan jumlah pengunjung.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan narasumber pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan pariwisata di desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlaksana atas kerjasama tim dari individu yang baik. Pengorbanan anggota organisasi berupa waktu, tenaga, dan pikiran membuahkan hasil kegiatan yang terlaksana dan sukses. Hasil wawancara dengan narasumber juga dapat diketahui bahwa untuk kemampuan individu dalam menerima wisatawan sudah maksimal, namun masih terkendala dipenggunaan bahasa asing. Sehingga untuk mentaktisi hal tersebut, salah satu anggota diberi tugas khusus yang bertugas sebagai juru bahasa dari wisatawan asing. Hal ini merupakan cara cerdas dalam pembagian kerja pada organisasi dalam menutupi kelebihan dan kekurangan satu sama lain.

Peran individu yang berkomitmen dan berkualitas dalam pengembangan desa wisata sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Melalui kombinasi keterampilan, kewirausahaan, kreativitas, kepemimpinan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, individu dapat berkontribusi secara positif dalam membangun desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di Desa Tompo Bulu.

Aspek organisasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wisata di Desa Tompo Bulu. Organisasi yang baik dapat memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan desa wisata. Beberapa aspek organisasi yang relevan dalam pengembangan desa wisata yakni Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Aspek kelembagaan pada desa wisata perlu dimiliki kelembagaan yang jelas dan terstruktur untuk mengelola aktivitas pariwisata ([Endiyanti & Sarwadi, 2021](#); [Hidayah, 2017](#); [Suranny, 2021](#)). Ini dapat berupa kelompok masyarakat lokal, lembaga pemerintah setempat, asosiasi pariwisata, atau badan usaha pariwisata. Kelembagaan ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis, mengatur perencanaan dan pengembangan desa wisata, serta memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan.

Desa Wisata Tompo Bulu memiliki organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong sebagai lembaga yang akan mengelola seluruh destinasi wisata di Desa Tompo Bulu. Terbentuknya kedua lembaga organisasi ini menjadi langkah lebih baik yang dilakukan seluruh aparat pemangku kebijakan dalam mengambil langkah untuk meningkatkan pengembangan desa wisata.

Selain aspek organisasi, desa wisata juga perlu memiliki struktur organisasi yang jelas dan efisien. Hal ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, hierarki yang terdefinisi dengan baik, dan saluran komunikasi yang efektif antara anggota organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memfasilitasi koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dengan lebih efisien. Struktur organisasi pada Pokdarwis dan KPE Dentong mempercayakan pemuda desa untuk mengambil peran penting dalam mengelola organisasi dan mewujudkan tujuan organisasi.

Dari seluruh narasumber yang ditanyai terkait manajemen organisasi, terdapat hal yang dalam perencanaan, pengelolaan, penggerakan, dan pengontrolan sudah cukup maksimal dalam organisasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok pengelola ekowisata (KPE Dentong). Dari penempatan anggota dalam organisasi, implementasi tugas dan fungsi anggota dalam organisasi, komunikasi antar anggota, serta kerja sama tim dalam organisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian yang cukup maksimal dalam organisasi.

Keseluruhan, aspek organisasi yang kuat dan efektif dalam pengembangan desa wisata akan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pariwisata dengan baik. Organisasi yang baik akan mendukung keberlanjutan, inovasi, kolaborasi, dan keberhasilan pengembangan wisata di Desa Tompo Bulu.

Aspek selanjutnya yang memainkan peran penting dalam pengembangan wisata di Desa Tompo Bulu adalah jaringan organisasi. Melalui kolaborasi dan kerja sama antara berbagai organisasi terkait, pengembangan desa wisata dapat menjadi lebih holistik, berkelanjutan, dan efektif. beberapa aspek

jaringan organisasi yang relevan dalam pengembangan desa wisata terdiri dari aspek kolaborasi dan komunitas lokal, kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian.

Kolaborasi dengan komunitas lokal adalah aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Melibatkan komunitas lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk dan layanan, dan pelestarian budaya lokal akan meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Komunitas lokal juga dapat memberikan pengetahuan unik tentang tradisi, budaya, dan sumber daya lokal yang berharga bagi pengembangan desa wisata.

Pokdarwis dan KPE Dentong seringkali menjalin kerja sama dengan komunitas lokal, seperti Pejalan Balocci yang merupakan komunitas pendaki gunung yang pernah menjalin kerja sama dalam melakukan aksi ekspedisi sosial, kerja bakti, dan kegiatan pendakian bersama. Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti, organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong selalu membuka ruang kerja sama kepada seluruh organisasi, dinas, dan lembaga pendidikan untuk menjalin kerja sama terkhusus dalam peningkatan desa wisata.

Pada akhir tahun 2022, Desa Wisata Tompo Bulu bekerja sama dengan Geo Park Maros Pangkep dalam melaksanakan kegiatan Jambore Geo Prak dan menghadirkan siswa siswa yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini tentunya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengunjung di desa wisata dan tentunya memberikan pengalaman lebih kepada anggota organisasi Pokdarwis dan KPE Dentong yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan dan Penelitian: Institusi pendidikan dan penelitian, seperti universitas atau lembaga penelitian, dapat menjadi mitra penting dalam pengembangan desa wisata. Mereka dapat memberikan pengetahuan, penelitian, dan saran yang berharga dalam bidang pariwisata, keberlanjutan, manajemen destinasi, dan inovasi. Melibatkan institusi pendidikan dan penelitian dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengembangan desa wisata.

Tahun 2020, pemerintah desa Tompo Bulu resmi menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Universitas Negeri Makassar dalam hal ini Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar sebagai desa binaan. MoU ini berlaku hingga tahun 2023 dengan berbagai rencana strategis yang diberikan oleh pihak UKM Pramuka UNM dalam membantu peningkatan dan pengembangan desa Tompo Bulu. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pemberdayaan petani gula aren, kemudian inovasi kemasan gula aren, pelatihan peningkatan desa wisata berbasis kelompok pemuda desa, hingga kegiatan yang mendatangkan peserta didik SMA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebut kegiatan *Tarsius Fest*.

Tepat pada jum'at 14 oktober 2022, unsur pimpinan Universitas Negeri Makassar, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menghadiri langsung kegiatan *Tarsius Fest* tahun 2022

dengan agenda peletakan batu pertama tugu desa binaan UKM Pramuka UNM dilanjutkan dengan kegiatan jumpa tokoh bersama Bapak Wakil Rektor 3 untuk memberikan semangat dan motivasi kepada siswa siswi SMA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang hadir sebagai peserta pada kegiatan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE Dentong) sudah cukup maksimal dalam menjalin kerja sama dengan organisasi lain terkait. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Jaringan organisasi yang sangat penting ini, menjadi perhatian dari organisasi jika ingin meningkatkan kualitas organisasi. Melalui jaringan organisasi yang kuat, pengembangan desa wisata dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang beragam untuk mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan dan sukses di Desa Tompo Bulu.

Tata kelola publik juga merupakan aspek penting dalam pengembangan wisata di Desa Tompo Bulu, yang melibatkan peran pemerintah dan lembaga publik dalam merumuskan kebijakan, mengatur, dan mengelola aktivitas pariwisata di tingkat lokal. Beberapa aspek tata kelola publik yang relevan dalam pengembangan desa wisata yakni pengelolaan Infrastruktur serta pengawasan dan evaluasi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur yang mendukung pengembangan desa wisata, seperti jalan, transportasi, sanitasi, air bersih, dan energi. Pemerintah perlu memastikan adanya infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan operasional desa wisata. Pengelolaan infrastruktur yang baik akan memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Aspek ini masih belum maksimal atau masih kurang baik, dengan beberapa kekurangan fasilitas umum yang ada di desa Tompo Bulu. Saat pertama kali peneliti berkunjung ke Desa Tompo Bulu tahun 2021, akses jalan hingga akses internet masih sangat memprihatinkan. Sulitnya akses jalan serta penerangan jalan yang masih belum ada dapat menghambat minat para wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata. Tak hanya akses jalan dan penerangan, kesulitan akses internet juga sangat menjadi pertimbangan wisatawan untuk berkunjung. Mengapa tidak, kemajuan teknologi saat ini sangat bergantung pada jaringan internet, sehingga jika jaringan internet yang sulit bahkan tidak ada akan menjadi faktor yang menurunkan minat wisatawan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan desa wisata. Hal ini meliputi pemantauan kegiatan pariwisata, penilaian kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, dan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari

pengembangan desa wisata. Pengawasan dan evaluasi yang berkala dan obyektif akan membantu dalam perbaikan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Sarana dan prasarana dalam level kapasitas lembaga ini masih kurang maksimal. Masih banyak fasilitas umum yang memerlukan perbaikan. Penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana masih sangat kurang sehingga membutuhkan banyak bantuan dari beberapa pihak untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih layak di Desa Tompo Bulu. Melalui tata kelola publik yang baik, pengembangan desa wisata dapat terkelola dengan baik, menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan lingkungan, serta meminimalkan potensi dampak negatif.

Aspek nilai, norma, dan praktik sosial juga menjadi bagian dalam pengembangan desa wisata. Mereka membentuk landasan budaya dan sosial yang mengarahkan perilaku dan interaksi masyarakat lokal serta wisatawan di dalam desa wisata. Aspek penting yang perlu diperhatikan yakni nilai budaya, keterlibatan komunitas lokal dan etika wisata.

Desa wisata dapat memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan identitas lokal yang unik. Ini melibatkan penghargaan terhadap tradisi, kearifan lokal, seni, bahasa, dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Dalam pengembangan desa wisata, penting untuk mempertahankan dan menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas desa tersebut. Hal ini akan memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan dan membangun kebanggaan serta keberlanjutan budaya lokal.

Pada kegiatan pariwisata ada berbagai paket wisata budaya yang dapat wisatawan saksikan di Desa Tompo Bulu. Pelestarian budaya yang ada sangat terjaga dengan maksimal sebab seluruh unsur pemerintah dan elemen masyarakat senantiasanya menjunjung tinggi pelestarian budaya yang ada. Pada 15 oktober 2022 wisatawan yang merupakan peserta kegiatan *tarsius fest* tahun 2022 menyaksikan persembahan Mappadendang. Mappadendang ini merupakan budaya masyarakat desa Tompo Bulu, yang merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada yang Maha Kuasa.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal adalah aspek kunci dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kegiatan pariwisata. Melibatkan komunitas lokal memungkinkan mereka untuk memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya wisata secara berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata sangat maksimal. Terdapat antusias masyarakat saat pemerintah desa melaksanakan kegiatan atau *event* pariwisata. Masyarakat turut hadir meramaikan kegiatan yang dilaksanakan bahkan tak jarang membantu pelaksanaan

kegiatan. Seperti kegiatan peringatan 17 Agustus 2022, masyarakat memadati lapangan utama desa Tompo Bulu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia

Etika wisata mencakup perilaku dan praktik yang diharapkan dari wisatawan dan masyarakat lokal dalam konteks pariwisata. Ini melibatkan penghargaan terhadap budaya dan tradisi lokal, pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat setempat, dan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Etika wisata yang baik akan membantu membangun hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta meminimalkan dampak negatif terhadap budaya dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa budaya yang telah dianut dan hidup dimasyarakat merupakan hal yang dijaga dan dijunjung tinggi. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dan memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas pribadi mereka dapat digunakan oleh wisatawan. Nilai seperti inilah yang menjadi hal positif yang lahir dimasyarakat desa. Praktik sosial yang saling membantu satu sama lain juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga kemajuan desa wisata tidak akan dapat melunturkan nilai-nilai kebaikan, praktik sosial yang baik, dan budaya masyarakat yang yakini.

Pengembangan desa wisata, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat lokal. Dengan memperkuat dan mempromosikan aspek ini, pengembangan desa wisata dapat menjadi lebih berkelanjutan, memperkaya budaya lokal, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung di Desa Tompo Bulu. Kelembagaan desa yang kuat dan berfungsi dengan baik, seperti lembaga pemerintahan desa, kelompok masyarakat, atau asosiasi wisata desa, dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan struktur organisasi untuk pengelolaan desa wisata. Hal ini memungkinkan adanya perencanaan yang sistematis, koordinasi yang efektif, dan pelaksanaan kegiatan yang teratur. Dengan demikian, desa dapat mengelola aset wisata dengan lebih baik, termasuk pengembangan infrastruktur, pengaturan aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, dan promosi pariwisata.

Kelembagaan desa yang terorganisir juga dapat memainkan peran penting dalam pemasaran dan promosi destinasi. Mereka dapat mengembangkan strategi branding, membuat materi promosi, mengelola situs web dan media sosial, serta mengkoordinasikan kegiatan promosi dengan pihak terkait lainnya. Dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, desa dapat memperluas jangkauan promosi, menarik wisatawan potensial, dan memperkuat citra destinasi wisata mereka.

Dengan demikian, kapasitas kelembagaan desa yang baik sangat penting dalam pengembangan desa wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan pengelolaan, partisipasi

masyarakat, koordinasi antar-*stakeholder*, akses pendanaan, serta promosi desa wisata. Ini semua dapat berkontribusi pada pembangunan desa wisata yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melestarikan sumber daya alam dan budaya lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang penulis lakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan lima dimensi Stephane Willems dan Kevin Baumert sudah cukup baik dalam menunjang pengembangan desa wisata. Hal ini dapat dilihat dari indikator, nilai, norma, dan praktik sosial yang baik. Kemudian individu, organisasi, dan jaringan organisasi yang cukup baik. Sedangkan tata kelola publik yang masih kurang baik.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, dari beberapa aspek, yakni dari aspek individu pada organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE Dentong) diharapkan mampu mendapat wadah pengembangan keterampilan lebih terkhusus pada penggunaan bahasa asing dan pengelolaan sosial media. Selain itu, Aspek organisasi yang belum dapat dimanajemen dengan maksimal diharapkan mampu diberikan ruang untuk organisasi berkembang dan mengelola organisasi menjadi lebih baik. Jika dari aspek jaringan organisasi yang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menunjang peningkatan kegiatan pariwisata sebaiknya menjalin kerja sama lebih banyak dan lebih luas lagi. Tidak hanya organisasi lokal namun diharapkan mampu menjalin hubungan kerja sama dengan instansi yang lebih tinggi lagi. Serta dari aspek tata kelola publik yang membutuhkan perhatian lebih dari seluruh elemen pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan pemerintah desa tentunya dalam penyediaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar memberikan kenyamanan kepada seluruh wisatawan. Akses jalan, penerangan jalan, dan akses internet membutuhkan perhatian khusus agar mendapat pembenahan. Kemudian sarana untuk organisasi berupa fasilitas sekretariat, fasilitas barang elektronik juga perlu pengadaan untuk mendukung kelancaran pekerjaan dalam organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. S. (2022). Implementasi Pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia. *Al-DYAS*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.58578/alldyas.v1i1.1319>
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2021). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39–55. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>

- Anggraini, R. S. (2019). Kerjasama Indonesia - United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Hijau melalui Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures (STREAM) di Pangandaran. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2), 1–39.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka.
- Endiyanti, S. R., & Sarwadi, A. (2021). Pengelolaan Ekowisata Di Desa Wisata Pancoh, Turi, Sleman, Yogyakarta. *Cakra Wisata Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 21(4), 34–46. <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/55209>
- Feriani, B. (2020). Implikasi pengembangan desa wisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal studi kasus di Desa Ketenger. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 34–46.
- Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4(1), 22–31.
- Haryono, S. (2013). Balanced Score Card untuk Mengukur Kinerja Sektor Publik. *Stie Ypn*, 4(1), 32–54.
- Hidayah, N. I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 738–750.
- Hidayat, T., & Muchtar, A. (2022). Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Tourism Scientific Journal*, 8(1), 93–104.
- Hiryanto, H., Tohani, E., & Miftahuddin, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengurus Karangtaruna melalui Optimalisasi Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i1.27875>
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Iriansyah, A. A. (2014). *Kapasitas Kelembagaan Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Khairul Amri, Tutut Ismi Wahidar, Ahmad Fuadi, Dedi Kusuma Habibie, & Geovani Meiwanda. (2022). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 15(2), 379–387. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.10852>
- Mahadewi, N. P. E., & Sudana, I. P. (2017). Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 41–45.
- Mikasih, Y., Fitrianti, & Juaris. (2024). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Gampong Genuren Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(April), 48–70.
- Nur, I., & Mariantha, I. N. (2018). Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1(1), 1090–1104.
- Nurjanah, N. (2018). Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(2), 96. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6406>
- Pajriah, S. (2018). Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>
- Paskasari, C. S. (2020). Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.22146/jpt.48259>
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Pramono, I. B., Oktavianti, H., Sutikno, & Ambariyanto. (2022). Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Buletin Ekonomika Pembangunan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(2), 155–165.

- Prayudi, M. A. (2020). Prospek Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Kulonprogo. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11(1), 27–32.
- Rahmat, T., & Apriliani, D. (2022). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sustainability Tourism Dalam Perspektif Green HRM. *KarismaPro*, 13(2), 87–98. <https://doi.org/10.53675/karismapro.v13i2.1073>
- Santi, N. D. M., Diwyarthi, Desak Gede Chandra Widayanthi, Luh Putu Kartini, Teguh Hadisukarno, Putu Surya Laksana Rahjasa, D., Gede Ngurah Byomantara Dw. Ayu Rai Sumariati, I Nengah Wirata, Luh Putu Citrawati, Ni Made Eka Mahadewi, Dewa Ayu Made Lily Dianasari Sakaria, Darwis, Hanugerah Kristiono Liestiandre, Ida Ayu Kalpikawati, Ni Wayan Chintia Pinaria, I Gusti Ayu Putu Wita In, I. A. S. P. A., & Editor. (2022). *Desa Wisata Membangun Desa dengan Pariwisata* (Issue 112). Politeknik Pariwisata Bali.
- Suganda, A. D. (2018). Konsep Wisata Berbasis Masyarakat. *I-Economic: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(1), 29–41.
- Suranny, L. E. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49–62.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2015). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *EPIGRAM (e-Journal)*, 11(1), 65–70. <https://doi.org/10.32722/epi.v11i1.666>
- Wibowo, S., Rusmana, O., & Zuhelfa, Z. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Tourism. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 1(2), 93–99. <https://doi.org/10.34013/jk.v1i2.13>
- Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., & Damai, A. A. (2019). Pengembangan wisata pantai mutun terhadap dampak fisik, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 83–90.